



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/100/RSJD.AHM/TU/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM.**



- KEDUA : Pegawai yang yang ditunjuk dalam diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai yang tercantum dalam diktum kedua melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003

Lampiran (3)



Lampiran
Keputusan Direktur
Nomor 100.3.3/15 /RSJD.AHM/TU/2025
Tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

ATASAN PPID : Direktur
Ketua PPID Rumah Sakit : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Layanan Informasi Publik : 1. Syarifah Farikah, A.Md.
2. Widyatma Yudha Pradana, S.Sn.
3. Angga Rahman, S.Kom.
4. Gerry Chrisna Perkasa Putra, S.Kom.
5. Ashari, S.Kom

Bidang Pengelolaan Dokumentasi/Data dan Arsip : 1. Okky Nanda, S.Kom.
2. Priyanto, A.Md.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik : Muhammad Pratama,SH.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003



URAIAN TUGAS

1. Penyediaan Informasi Publik

- Mengelola dan menyediakan informasi publik terkait kegiatan, pelayanan, dan kebijakan rumah sakit.
- Menjamin ketersediaan informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti UU Keterbukaan Informasi Publik.

2. Pengelolaan Dokumentasi

- Merekam, menyimpan, dan mengelola dokumen administratif dan informasi publik rumah sakit.
- Menjamin keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan dokumentasi rumah sakit.

3. Pelayanan Informasi Publik

- Menyediakan layanan permintaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan prosedur.
- Menerima, memproses, dan merespons permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan.

4. Pengklasifikasian Informasi

- Menentukan klasifikasi informasi publik yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Meninjau dan memperbarui klasifikasi informasi secara berkala.

5. Koordinasi dan Komunikasi

- Berkoordinasi dengan unit kerja lain di rumah sakit untuk memastikan ketersediaan informasi yang valid dan terintegrasi.
- Menjadi penghubung antara rumah sakit dan pihak eksternal, seperti masyarakat, media, dan lembaga pemerintah.

6. Penyelesaian Sengketa Informasi

- Mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan informasi.
- Menyelesaikan sengketa informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Penyusunan Laporan

- Menyusun laporan tahunan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi rumah sakit.
- Menyampaikan laporan kepada pimpinan rumah sakit dan instansi terkait sesuai kewajiban hukum.



8. Sosialisasi dan Edukasi

- Melakukan edukasi kepada pegawai rumah sakit tentang pentingnya keterbukaan informasi dan tata kelola dokumentasi.
- Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak atas informasi publik rumah sakit.

9. Pemeliharaan Sistem Informasi

- Mengembangkan dan memelihara sistem teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi rumah sakit.
- Memastikan keamanan data dan sistem yang digunakan untuk penyimpanan informasi.



Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025
Direktur,

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196705301998032003